

PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK RESTORAN KOTA PEKANBARU (STUDI PAJAK KATERING DAN KANTIN TAHUN 2013-2014)

Oleh :

Rinaldi Nugraha

Pembimbing: Adlin. S.Sos, M.Si

**Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Phone/Fax : +62 (0761), 63277

Website : <http://Fisip.Unri.ac.id>

ABSTRAK

Studi ini dilatar belakangi terhadap visi antara yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2012-2017 yang berupaya untuk mewujudkan kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Penelitian dilakukan untuk menganalisa implementasi yang dilakukan Pemerintahan Kota Pekanbaru perihal keamanan dan ketertiban umum dalam upaya pencapaian visi kota Pekanbaru terutama terhadap permasalahan penyakit masyarakat serta mengidentifikasi hambatan yang didapati dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah Kota Pekanbaru telah menjabarkan visi secara runtut mulai dari misi yang mendukung terwujudnya visi, kemudian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta instansi yang telah diembankan tugas perihal keamanan, termasuk didalamnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, kemudian juga kepolisian yang memiliki tugas pokok perihal keamanan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan nyata dilapangan secara sistematis dan akurat terkait fakta maupun unit analisis penelitian, serta pengamatan lapangan berdasarkan data (informasi) tertentu. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan pelaksanaan implementasi untuk mengatasi permasalahan penyakit masyarakat didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan sedari awal. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat. Dalam implementasi tiap instansi melaksanakan tugas walaupun dalam pelaksanaan mendapati hambatan, tugas tersebut tetap dapat terlaksana baik dalam melakukan razia, penjagaan di wilayah yang rawan oleh Satpol PP, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kesbang, dan juga operasi-operasi yang menunjang keamanan masyarakat yang dilakukan oleh Kepolisian. Dalam pelaksanaannya, tiap-tiap instansi saling melakukan koordinasi satu sama lain untuk dapat meringankan tugas mereka dengan saling bekerja sama.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan Publik, Pajak Katering Dan Kanting.

**PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK RESTORAN KOTA PEKANBARU
(STUDI PAJAK KATERING DAN KANTIN TAHUN 2013-2014)**

Oleh :

Rinaldi Nugraha

Pembimbing: Adlin. S.Sos, M.Si

**Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Phone/Fax : +62 (0761), 63277

Website : <http://Fisip.Unri.ac.id>

Abstract

The background of this study to the vision set by the Government between Pekanbaru years 2012-2017 that seeks to realize the Pekanbaru city as a metropolis civil. The study was conducted to analyze the implementation of Pekanbaru City Government conducted concerning security and public order in an effort to achieve the vision of Pekanbaru city, especially to the problems of society's ills and identification obstacles that are found in the implementation process. Pekanbaru City Government has outlined a vision coherently start of a mission that supports the realization of the vision, then the goals, objectives, strategies, policies and institutions that have been entrusted the task of safety issues, including the Civil Service Police Unit and the National Unity and Political Pekanbaru, then the police also have a fundamental duty safety issues.

This type of research is descriptive qualitative study aimed to describe the real state of the field systematically and accurately related facts and research analysis unit, as well as field observations based on data (information) in particular. Methods of data collection is by interview, documentation and observation.

The results of this study describes the implementation of the implementation of the community to address issues of disease based on the goals that have been set from the beginning. Development of community protection efforts to maintain and preserve security, order, unity, and the unity and harmony of society. In the implementation of each institution performing the task, although in the implementation find obstacles, the task can still be accomplished either in a raid, secure in-prone areas by municipal police, socialization activities conducted by Unity, and also operations that support community safety conducted by Police. In practice, each institution mutually coordinated with one another in order to ease their task by working together.

Keywords: Locally Generated Revenue, Policy, Texes Catering And Canteen

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan Sistem Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab seperti yang anut pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah, maka selain Daerah harus mampu mengurus rumah tangga Daerahnya sendiri, juga sekaligus menerima penyerahan kewenangan yang luas, dan nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara profesional yang diwujudkan.

Menyadari beratnya tanggung jawab dan kewajiban Daerah dalam mempertahankan Otonomi Daerah tersebut, maka salah satu upaya dalam penanggulannya adalah dengan jalan menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah, baik itu berupa sumber-sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pemerintahan atasan, maupun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Adapun Klasifikasi dari sumber-sumber Keuangan Daerah menurut pasal 157 sampai dengan pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian dirinci dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada pasal 5 dan seterusnya perihal Pendapatan Daerah bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan, dan;
- c. Lain-lain Pendapatan.

Riwu Kaho (2012 : 253) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan,

Merujuk pada permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penulisan perihal belum optimalnya pungutan pajak kantin dan catering di kota Pekanbaru tahun 2013-2014, yang mana perihal pajak kantin dan catering ini masih menjadi bagian dari pajak restoran. Dari data yang diperoleh dari Dispenda Kota Pekanbaru, bahwa penerimaan pajak Restoran di Kota Pekanbaru Tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar Rp.36.115.516.227, untuk Realisasi penerimaan sebesar Rp.35.408.531.067 atau tercapai 98.04%,

Pada Tahun 2014 target yang ditetapkan Rp.61.424.228.000 sementara yang diterima oleh daerah Rp.49.087.877.030 atau tercapai 79.92%, maka Tunggakan pajak Restoran untuk Tahun 2014 cukup besar, walaupun Realisasinya hampir 80%, namun Pemerintah tetap mengalami kerugaian dari penerimaan pajak Restoran, pajak Restoran sebenarnya ditanggung penuh oleh konsumen dari Pelayanan Restoran berupa pembayaran pembelian makan atau minuman di Restoran dengan nilai 10 % (sepuluh persen) dari besarnya tagihan sehingga tidak ada hak dari pengusaha Restoran menahan

pembayaran pajak yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selanjutnya berikut ini merupakan sajian data untuk pendapatan penerimaan Pajak Restoran Kantin dan Usaha /atau Restoran Katering di Kota Pekanbaru pada Tahun 2013 sampai Tahun 2014. Target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan besaran nilai yakni Rp.315.388.101, Realisasi yang tercapai pada penerimaan pajak Restoran Kantin adalah sebesar Rp. 210.641.500, dapat diartikan bahwa penerimaan tidak mencapai target yang di tetapkan, 88.03 persen dari tareget.

Jika total jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari 2 (dua) item/atau Jenis dari pajak Restoran yakni pajak Kantin dan Ketering sebesar Rp. 308.498.385, nilai persentase hanya sebesar 65.82 persen dari yang ditetapkan total jumlah penerimaan dari 2 (dua) item/atau jenis dari Pajak Restoran, Kantin dan Katering Rp.1.320.972.998, yang bersumber pada Kemudian Pajak Katering juga tidak mencapai target pada Tahun 2013 hanya 20.13 persen yang tercapai yakni sebesar Rp.30.856.885 dari taeget yang ingin di capai sebesar Rp.153.324.095.

Tahun 2014 penerimaan pajak Restoran Kantin dan Katering di Kota Pekanbaru juga tidak jauh berbeda sama hal dengan Tahun 2013 tidak mencapai target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp.1.320.972.998, sementara yang diterima Realisasi sebesar Rp.280.098.975, itu sama artinya dengan 21.2 persen masuk

pada pos Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sumber Pajak Restoran di Tahun 2013 dan Tahun 2014, ini dibuktikan dengan data yang dapat di Tabel I.3 diatas merupakan data yang penulis himpun dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, menunjukkan tidak adanya pencapaian penerimaan pajak Restoran Katering yang diharapkan, target yang telah ditetapkan sebesar Rp.1.303.324.000, Realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp.891.411.279, nilai persentasenya hanya sampai pada 73,77 persen.

Dan juga dapat diartikan jumlah total dari dua item penerimaan pajak Restoran Kantin dan Katering pada Tahun 2014 sebesar Rp.1.171.510.254 dari Target yang diharapkan untuk total jumlah dua item penerimaan pajak Restoran Kantin dan Ketering sebesar Rp.1.978.535.084, nilai persentase sebesar 59.21 persen yang masuk Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.

Dari fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut, alasan ketertarikan penulis untuk meneliti masalah pajak Restoran, Kantin Serta Kantin ini disebabkan yang mana kenyataan semala ini, wajib pajak Restoran, Kantin dan Katering di Kota Pekanbaru masih kurang kesadaran dalam pembayaran pajak Restoran, Kantin dan Katering, guna optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Restoran di Kota Pekanbaru, selain kurangnya kesadara para wajib pajak dalam membeyar pajak, juga kurang serius petugas memungut pajak yang dalam hal ini

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam memungut pajak dari wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena empiris di atas, maka terdapat poin-poin yang menjadi permasalahan dalam penelitian, berikut yang menjadi perumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Restoran, sub sektor Katering dan Kantin pada Tahun 2013-2014?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam mengoptimalkan pendapatan pajak Restoran katering dan Kantin oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a) Untuk melihat bagaimana upaya pelaksanaan peningkatan pendapatan pajak Restoran, Katering dan Kantin oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014.
- b) Untuk melihat hambatan-hambatan dalam mengoptimalkan pendapatan pajak Restoran Katering dan Kantin oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014.

D. Tinjauan Teori

1. Teori Kebijakan

Hodgetts dan Wartman dalam Ndraha (2011: 492) berpendapat bahwa kebijakan (business policy) itu

bertingkat-tingkat dan tersusun secara vertikal, struktural, mulai dari kebijakan yang bersifat umum sampai pada kebijakan yang bersifat praktikal dan kongkrit.

2. Teori Kebijakan Ekstraktif

Menurut pendapat Ramlan Surbakti (1992:96) menjelaskan Kebijakan publik Ekstraktif, yaitu penyerapan sumber-sumber meteriil dan sumber daya manusia yang ada pada masyarakat.

3. Teori Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan.

4. Kinerja Implementasi Kebijakan Publik

Sebagai fokus kajian, kinerja implementasi menjadi bagian yang paling penting dalam studi implementasi. Pengetahuan peneliti tentang kinerja implemtasi menjadi hal yang vital, sebab berdasarkan pengetahuan dimiliki tersebut ia akan membuat judgement (Penilaian) apakah impelentasi sautu kebijakan boleh dikatakan berhasil atau gagal.

Secara khusus akan memfokuskan perhatian pada yang paling utama tentang penilaian kinerja implentasi. Pokok-pokok yang akan dikaji antar lain yakni : Kerangka Kerja Penilaian, pengembangan,

indikator, model evaluasi kinerja, teknik pengumpulan dan analisis data.

5. Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Widayat (1995) dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara instensifikasi dan ekstensifikasi.

a. Cara instensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.

b. Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

6. Optimalisasi Pajak Daerah

Menurut Winardi (1999: 363) Optimaslisai Dalam upaya mengoptimalisasikan penerimaan pajak daerah ada beberapa pendekatan yaitu melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Secara implisit kedua pendekatan ini terutang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu adanya kebijakan penyesuaian tarif maksimum yang baru serta adanya kewenangan untuk menciptakan pajak/retribusi daerah baru melalui peraturan daerah, akan tetapi dalam praktek ditemui adanya kecendrungan pemerintah daerah untuk menerapkan pendekatan ekstensifikasi.

Pendekatan ekstensifikasi yang dilakukan dengan tidak hati-hati akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya tumpang tindih antara jenis pajak satu dengan pungutan yang lain sehingga secara administratif semakin sulit untuk dilaksanakan. Hal ini diperkuat dengan pendapat Susiyati B. Irmawan bahwa yang menjadi penyebab rendahnya investasi swasta di daerah antara lain pungutan pajak dan retribusi daerah, sarana dan prasarana, promosi potensi daerah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk melihat, mengetahui, serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah atau tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif dengan metode kualitatif.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu :

1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terkait optimalisasi pungutan pajak kantin dan catering.

2) Data Sekunder,

Data yang diperoleh dari keterangan sumber-sumber lainya yang dapat menunjang objek yang

diteliti yaitu berupa hasil wawancara, dokumen, data terkait, dan media massa.

3. **Sumber Data**

a. **Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Informan penelitian ini dipilih secara *purposive* untuk penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono (2002: 96).

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi
- c. Observasi

5. **Teknik Analisa Data**

Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendeskripsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran Kantin dan Katering Oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 – 2014.

1. Pelaksanaan Upaya Peningkatan Pajak Restoran Secara Administrasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai pengelola serta pemungut Pajak Restoran dalam menjalankan tugasnya mempunyai sistem dan prosedur pengelolaan yang disebut dengan Manual Pendapatan Daerah berdasarkan Sistem dan prosedur terhadap pemungutan pajak antara lain meliputi:

1. Sistem dan Prosedur Pendaftaran dan Pendataan
2. Sistem dan Prosedur Pembayaran
3. Sistem dan Prosedur Pembukuan dan Pelaporan
4. Sistem dan Prosedur Pemungutan /atau Penegakan Hukum
5. Sistem dan Prosedur Keberatan.

2. Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pajak.

Pengertian sumber daya manusia adalah suatu cara untuk mengendalikan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau institusi secara efektif dan efisien, dan mencakup keseluruhan aktivitas dan implementasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kaitan antara kinerja organisasi dengan sumber daya manusia dalam proses penyelenggaraan organisasi public sesungguhnya bermuara pada kemampuan Daerah untuk mempersiapkan jajaran birokrasi yang ada bagi penyelenggaraan pelayanan

public secara optimal dan berdaya guna.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Bapak Yulisaman menerangkan bahwa :

“pengembangan Sumber daya manusia secara makro penting dalam rangka mencapai tujuan dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang ingin kita capai secara bersama dan efektif, pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana disertai pengelolaan yang baik diharapkan akan dapat menghemat penggunaan sumber daya alam, atau setidaknya pengelolaan dan pemakaian sumber daya alam dapat secara berdaya guna dan berhasil guna, demikian pula, pengembangan sumber daya manusia secara mikro di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini yang kita harapkan sebetulnya. .”(Wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 08 Mei 2016).

Namun pelaksanaannya perlu mempertimbangan factor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor Internal mencakup keseluruhan kehidupan organisasi yang dapat dikendalikan oleh pemimpin maupun anggota organisasi, yaitu Kebijakan Pemerintah, sosial budaya masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Pelaksanaan Sosialisasi Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran.

Secara periodik petugas bagian penyuluhan Pajak Restoran yang didampingi oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Pemuka Masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru diadakan penyuluhan dan penjelasan tentang bagaimana pentingnya membayar Pajak Restoran. Untuk melihat bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendaptan Daerah /atau Walikota untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, berikut ini hasil wawancara penullis dengan Kepala Dinas Pendaptan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“untuk sosialisasi kami berupaya dengan sebaik mungkin dengan melakukan dengan pelaksanaannya yang diadakan secara periodik yakni setiap Triwulan kami turun langsung mendatangi langsung Wajib Pajak, Pajak Restoran di wilayah Pekanbaru dengan harapan bisa memberikan informasi yang lengkap kepada mereka, untuk itu kami menyediakan petugas kendaran yang cukup memadai dengan penyuluhan langsung, kemudian kami juga berupa dengan cara melalui media masa serta Baliho yang terpasang di jalan-jalan. Dengan harapan kembali para wajib pajak memiliki kesadaran akan taat pajak. Tidak hanya itu saja mengikui perkembangan era informasi dengan internet kami juga berupaya juga memberikan informasi kepada tidak hanya wajib pajak , kami juga memberikan informasi kepada masyarakat, karna hakekatnya pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat khususnya diwilayah Kota Pekanbaru.”(Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru, 08 Mei 2016).

Kemudian penulis tidak terbatas hanya mencari informasi dari Pihak Dinas Pendapatan Daerah Saja, penullis juga mendapatkan Informasi dari wajib Pajak Restoran Pemilik Katering dan Kantin yang memiliki Izin, Pemilik Usaha Katering Trijata Katering, ibu Nana menjelaskan bahwa :

“kami saat ini belum mendapatkan sosialisasi dari Dinas, dalam beberapa waktu dekat ini, sehingga kami juga merasa kesulitan dan tidak mendapatkan informasi terbaru terkait dengan Pajak Restoran, ini yang membuat kami kadang kala merasa kesulitan dan tidak paham dalam hal-hal seperti pengisian Blangko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diberikan kepada kami.”(Wawancara dengan pemilik Katering yang tidak memiliki Izin, 22 Mei 2016).

Kemudian hal yang senada yang disampaikan oleh wajib pajak Kantin Buk Yul, Ibuk Yuliana Wati, bahwa :

“kami rasa kurang mendapatkan informasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, kami juga belum mendapatkan tanda bukti atau formulir/blangko Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) hal ini kami ketahui dari teman yang juga memiliki kantin dia mendapatkan blangko tersbut sementara kami samapai saat ini tidak mendapatkan, kadang kami merasa sulit untuk mendapat pelayanan Di Kantor Dinas.”(Wawancara penulis dengan

Pemilik Kantin yang tidak memiliki Izin, 22 Mei 2016).

Usaha- usaha yang tengah diusahakan Pihak Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru untuk Program sosialisasi Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran, Kepala Seksi Penerimaan Bapak Saiful menerangkan bahwa :

“dengan adanya usaha yang akan dirancang, maka sekarang ini dengan menjamurnya pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran tidak lagi menyulitkan dalam arti kata wajib pajak telah mau dengan kesadaran sendiri membayar jumlah setoran Pajak Restoran ke Kantor. Jadi usaha-usaha yang dilakukan Dinas untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran, merupakan yang cukup baik, dan diharapkan dapat memenuhi tertert pemungutan Pajak Restoran guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru.”(Wawancara penulis dengan Kasi Penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak, Dispenda Kota Pekanbaru, 11 Mei 2016).

Kesadaran akan membayar pajak juga dipergaruhi oleh pengetahuan wajib pajak tentang arti penting dari pajak dan guna pajak tersebut, untuk apa pembayaran pajak tentang tersebut harus diwajibkan setiap anggota masyarakat tanpa terkecuali. Jika para wajib pajak tidak diberikan penyuluhan tentang arti penting dan guna pajak, maka sudah barang pasti mereka tentu tidak akan memiliki kesadaran untuk membayar kewajiban akan pajak mereka.

B. Kendala Hambatan yang Dihadapi untuk Upaya Peningkatan Pemungutan

1. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayarkan Pajak Restoran.
2. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Restoran
3. Lemahnya Kemampuan Aparatur Pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat disimpulkan sebagai mana berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran pada Dinas pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari aspek penegakan hukum yang lemah terhadap wajib pajak Pajak Restoran yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan tentang peraturan Pajak Restoran yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan tentang peraturan Pajak Restoran sampai batas waktu yang ditentukan dalam pembayara Pajak Restoran, Karena keterlambatan dan menunggak dalam pembayaran Pajak Restoran, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan ini dikeluarkan setelah lewat waktu atau jatuh tempo pembayaran. Dan juga belum optimalnya dalam membayar pajak terhutang

meskipun diberikan surat teguran atau surat peringatan, maka Dinas Pendapatan mengeluarkan surat paksa. Sanksi yang diterapkan tidak memberikan ketatan kepada para wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru antara lain : Kurangnya Kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak pada waktu yang telah ditetapkan. Serta kurang baiknya pembuatan ketetapan wajib pajak khususnya di sektor Pajak Restoran, dan belum maksimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran terutama belum tersedianya data potensi pajak dan belum optimalnya penagihan tunggakan.

B. Saran

Adapun Dari beberapa kesimpulan yang telah disebutkan diatas, kiranya penulis perlu menyampaikan beberapa saran berkaitan dengan pemungutan Pajak terhadap Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar melaksanakan tugas sebagai pemungat Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, serta hendaknya Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan Sosialisasi, untuk meningkatkan pengetahuan tentang

- Pajak sehingga masyarakat sadar dan peduli akan pentingnya Pajak Restoran.
2. Terhadap wajib pajak yang tidak menginginkan sanksi berupa surat teguran maupun surat paksa, segera diterapkan sanksi pidana kurang selama 1 (satu) Tahun sebagai upaya penegakan Hukum terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Kompas Gramedia
- N, Dun Wiililiam. 2006. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nucholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan, dan Otonomi Daerah. Jakarta : Grasindo
- Nugraha D Rian. 2007. Analisa Kebijakan. Jakarta: PT Gramedia.
- Nugroho, Riant D. 2009. Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan). Yogyakarta: Graha Press.
- Parson, Wayne. 2005. Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Rasyid, Ryaas. 2002. Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rianto, Adi. 2014. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Snowball Sampling. Jakarta : Granit Press.
- Sherraden Michel. 2006. Aset Untuk Orang Miskin. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wirawan. 2011. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta : Rajawali Pers.